



PSHK  
Pusat Studi Hukum &  
Kebijakan Indonesia

# Proses Legislasi dan Partisipasi Publik

Rizky Argama

Peneliti PSHK - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Webinar "Kinerja DPR, Berdasarkan Suara Siapa?"

FISIP Universitas Padjadjaran, 3 Desember 2020



# Kerangka Presentasi

Kinerja DPR terkait fungsi legislasi

Persoalan dalam proses legislasi

Legislasi dan peran publik

# Pendahuluan

UU Cipta Kerja menjadi UU omnibus pertama, memiliki substansi dan prosedur pembentukan yang dianggap bermasalah, ditolak oleh banyak kalangan masyarakat.

Sejumlah UU lain yang dibahas dalam waktu sangat singkat: Perubahan UU KPK, Perubahan UU MK, Perubahan UU Minerba.

Proses legislasi yang kontroversial memicu gejolak di masyarakat.



Sumber foto: <https://pshk.or.id/publikasi/pengesahan-uu-cipta-kerja-legislasi-tanpa-ruang-demokrasi/> dan [https://blue.kumparan.com/image/upload/fl\\_progressive,fl\\_lossy,c\\_fill,q\\_auto:best,w\\_480,f\\_jpg/uy48idcmojhkeijhxvw1.jpg](https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive,fl_lossy,c_fill,q_auto:best,w_480,f_jpg/uy48idcmojhkeijhxvw1.jpg)



# Pertanyaan Diskusi

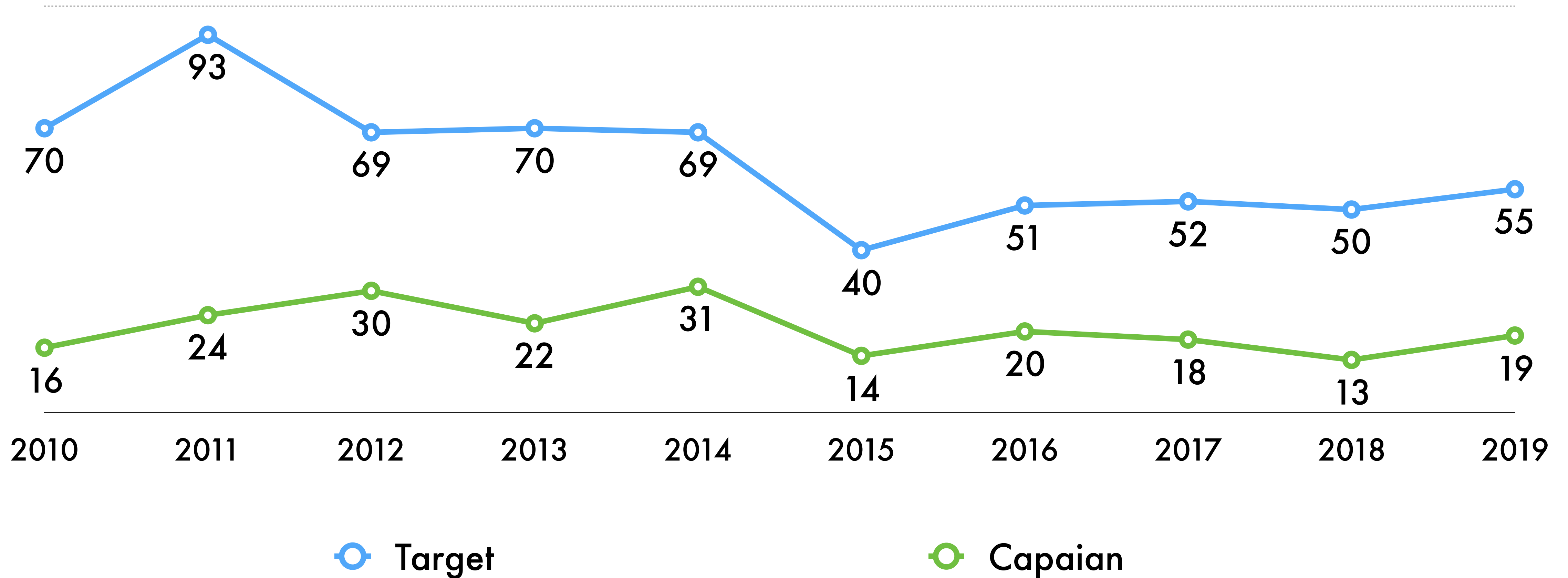
Pelajaran apa yang dapat diambil dari dinamika proses legislasi dalam beberapa tahun belakangan ini?

Peran apa yang dapat dimainkan oleh publik untuk mendorong produk legislasi yang lebih berkualitas serta proses legislasi yang transparan dan partisipatif?



# Kinerja Legislasi

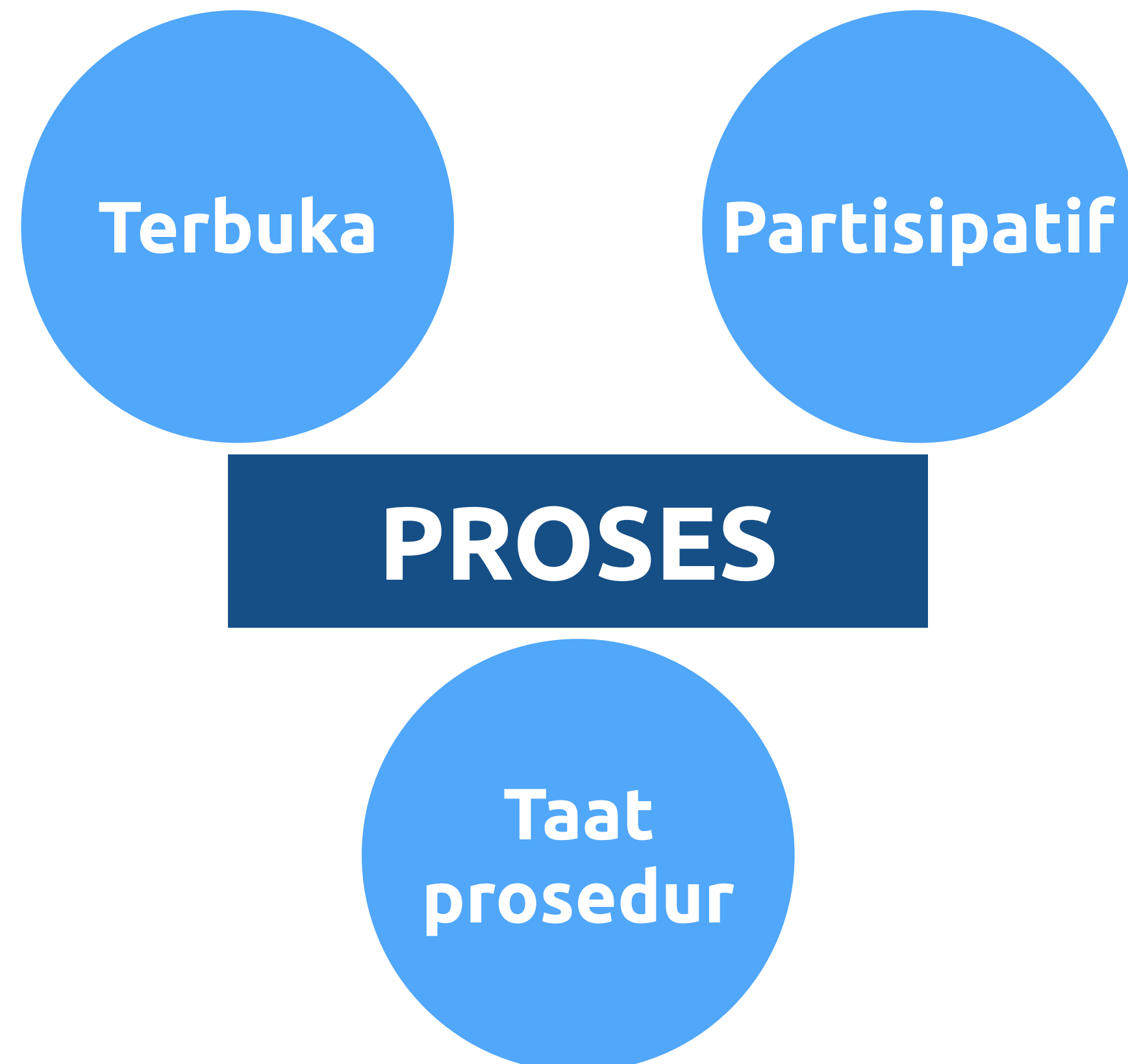
Aspek Kuantitas (Target vs Capaian RUU yang dihasilkan)





# Kinerja Legislasi

## Aspek Kualitas



# Problem Legislasi

Jumlah regulasi terlalu banyak (hiper-regulasi)

Perencanaan pembangunan tidak sinkron dengan perencanaan legislasi

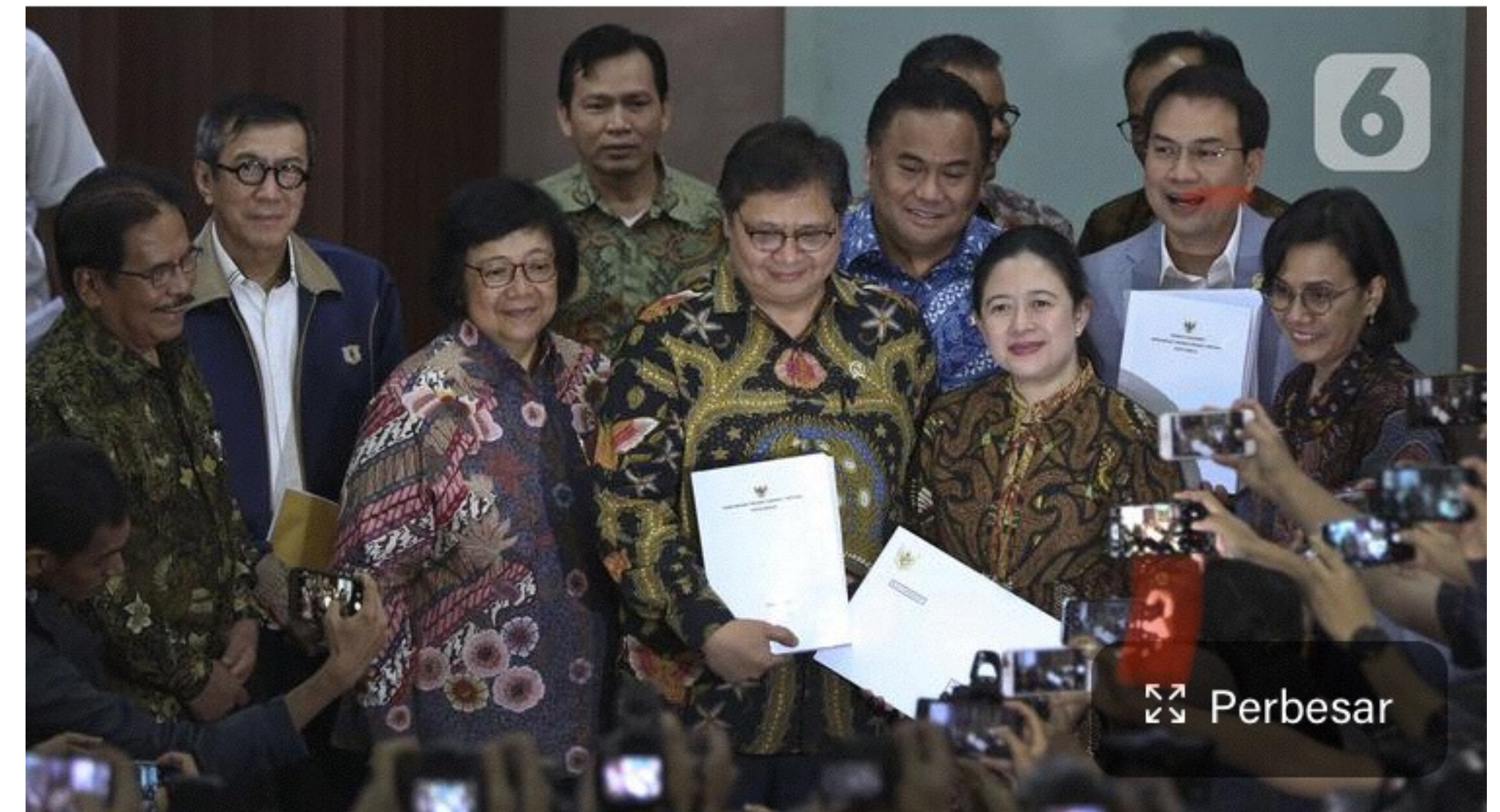
Materi muatan sering tidak sesuai dengan bentuk peraturan

Tidak ada mekanisme monitoring dan evaluasi yang terlembaga

Tidak ada otoritas tunggal yang berwenang dalam pengelolaan regulasi

## Omnibus Law Disebut Bisa Selesaikan Hiper Regulasi

Oleh [Liputan6.com](#) pada 14 Mar 2020, 15:02 WIB



Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menaker Ida Fauziyah dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyerahkan draft RUU Omnibus Law kepada Ketua DPR Puan Maharani, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

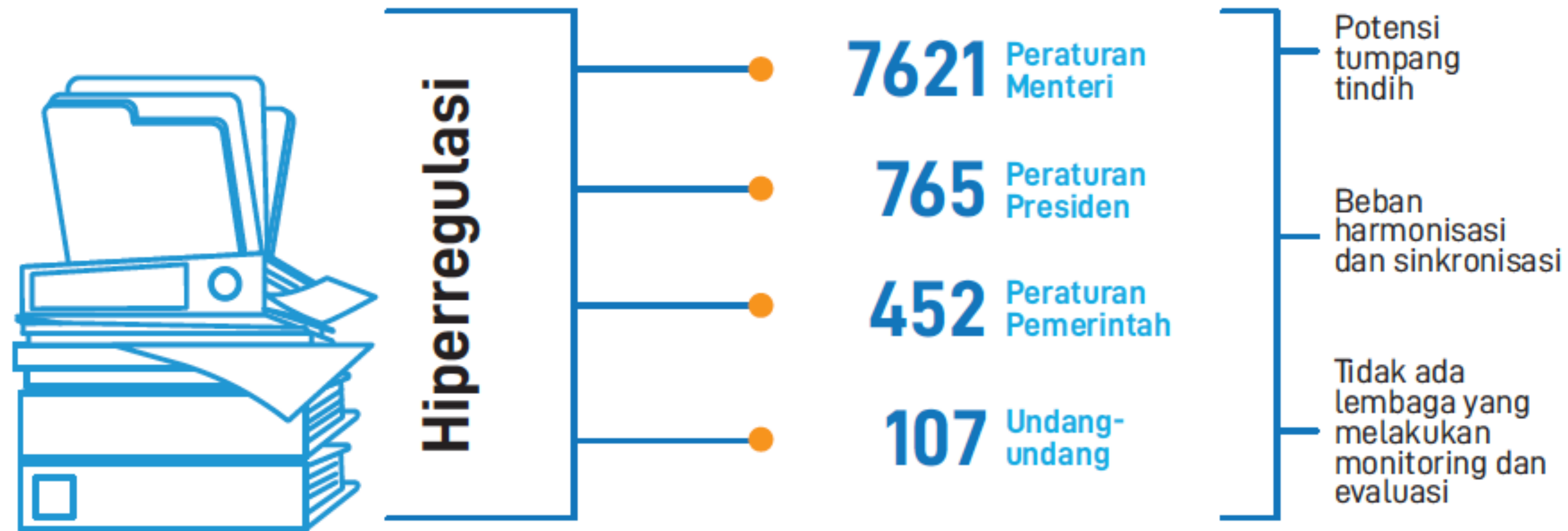


PSHK  
Pusat Studi Hukum &  
Kebijakan Indonesia

# Problem Legislasi

Jumlah regulasi terlalu banyak (hiper-regulasi)

**Jumlah Regulasi yang Dihasilkan di Tingkat Pusat (Periode 2014–Oktober 2018)**

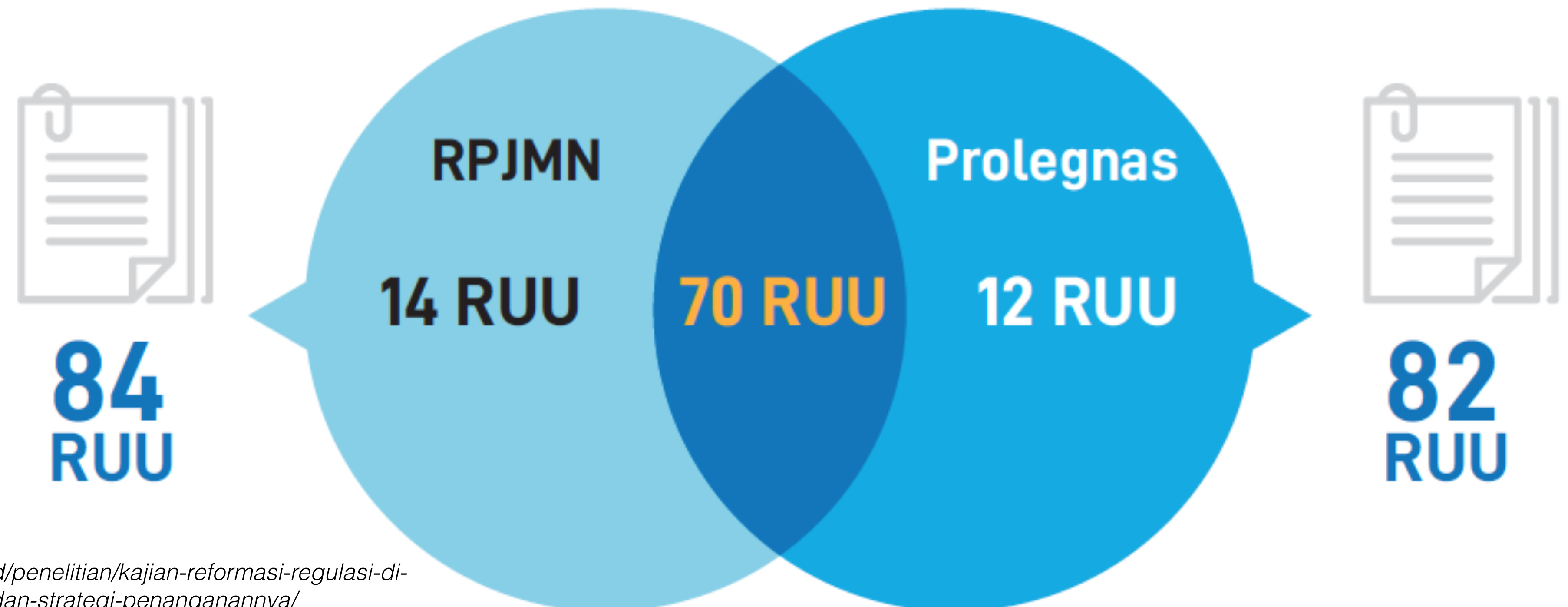




# Problem Legislasi

Perencanaan pembangunan tidak sinkron dengan perencanaan legislasi

Perbandingan dan irisan jumlah RUU yang diusulkan pemerintah dalam RPJMN 2015–2019 dan dokumen Prolegnas 2015-2019





# Problem Legislasi

Ketidaksinkronan juga terjadi antara perencanaan dan realisasi kebutuhan membentuk PP dan Perpres.

# 90%

## PP & Perpres

yang dihasilkan adalah di luar program penyusunan

Penyusunan PP dan Perpres di luar Progsun melalui prosedur izin prakarsa

Tahun Program Penyusunan	Jumlah RPP dalam Program Penyusunan	Realisasi Sesuai Rencana Program Penyusunan	Realisasi di luar Rencana Program Penyusunan
2014	80	18	83
2015	151	19	123
2016	196	35	64
2017	89	3	63
2018	43	3	45

Tahun Program Penyusunan	Jumlah Rancangan Perpres dalam Program Penyusunan	Realisasi Sesuai Rencana Program Penyusunan	Realisasi di luar Rencana Program Penyusunan
2014	22	11	179
2015	92	14	158
2016	91	2	123
2017	54	4	133
2018	30	3	124

# Problem Legislasi

Materi muatan sering tidak sesuai dengan bentuk peraturan

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
<p><b>Pasal 10</b></p> <p>(1) <b>Materi muatan</b> yang harus diatur dengan <b>Undang-Undang</b> berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945</b></li> <li>b. <b>perintah suatu UU untuk diatur dengan UU</b></li> <li>c. <i>pengesahan perjanjian internasional tertentu</i></li> <li>d. <i>tindak lanjut atas putusan MK</i></li> <li>e. <b>pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat</b></li> </ul>	<p><b>Pasal 8</b></p> <p><b>Materi muatan</b> yang harus diatur dengan <b>Undang-Undang</b> berisi hal-hal yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945</b> yang meliputi <ul style="list-style-type: none"> <li>1. <i>hak-hak asasi manusia</i></li> <li>2. <i>hak dan kewajiban warga negara</i></li> <li>3. <i>pelaksanaan dan penegakan kedaulatan serta pembagian kekuasaan negara</i></li> <li>4. <i>wilayah negara dan pembagian daerah</i></li> <li>5. <i>kewarganegaraan dan kependudukan</i></li> <li>6. <i>keuangan negara</i></li> </ul> </li> <li>b. <b>diperintahkan oleh suatu UU untuk diatur dengan UU</b></li> </ul>

# Problem Legislasi

Tidak ada mekanisme monitoring dan evaluasi yang terlembaga

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur soal monitoring dan evaluasi peraturan.

**Perencanaan**

**Penyusunan**

**Pembahasan**

**Pengesahan &  
Pengundangan**

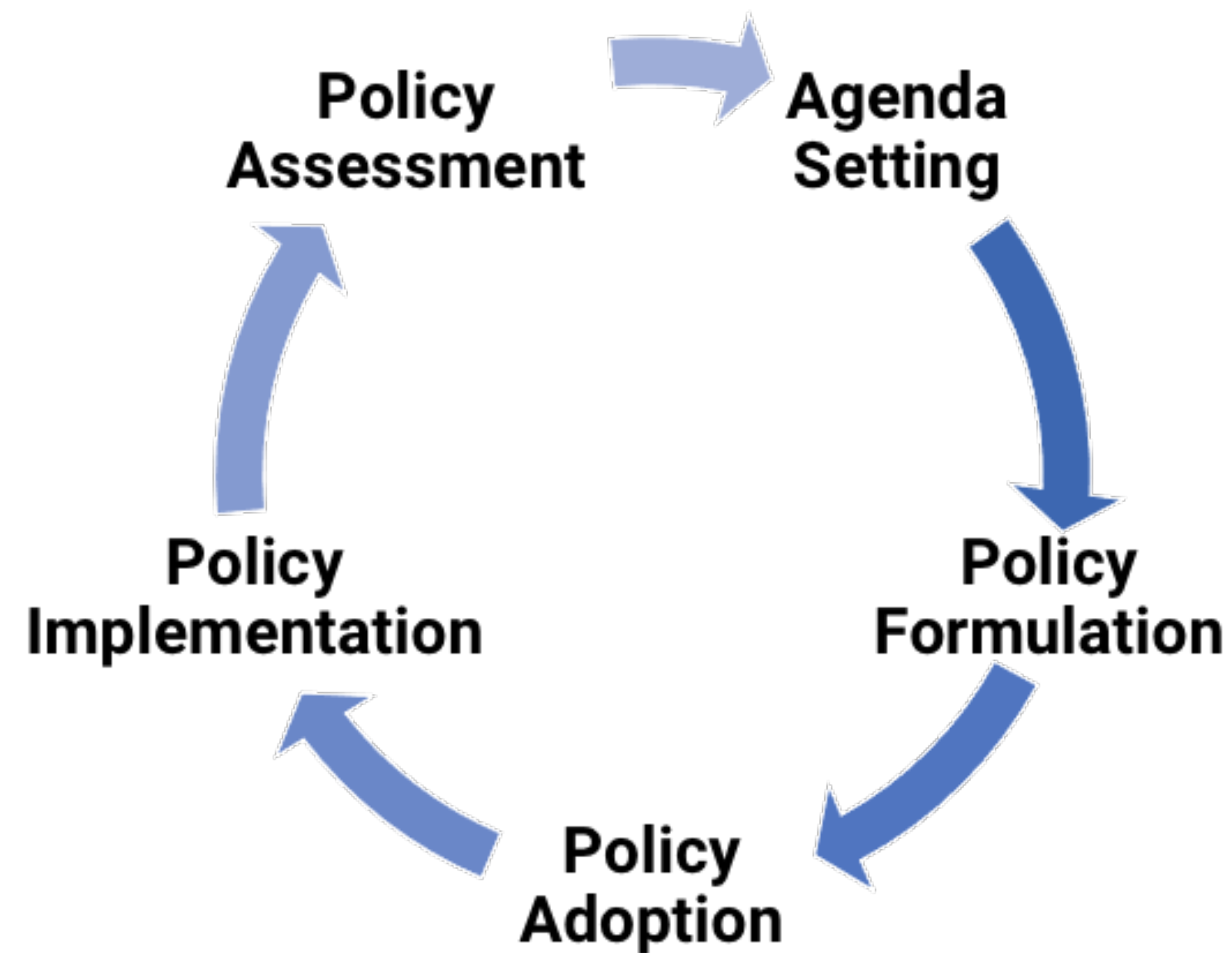
# Problem Legislasi

Tidak ada mekanisme monitoring dan evaluasi yang terlembaga

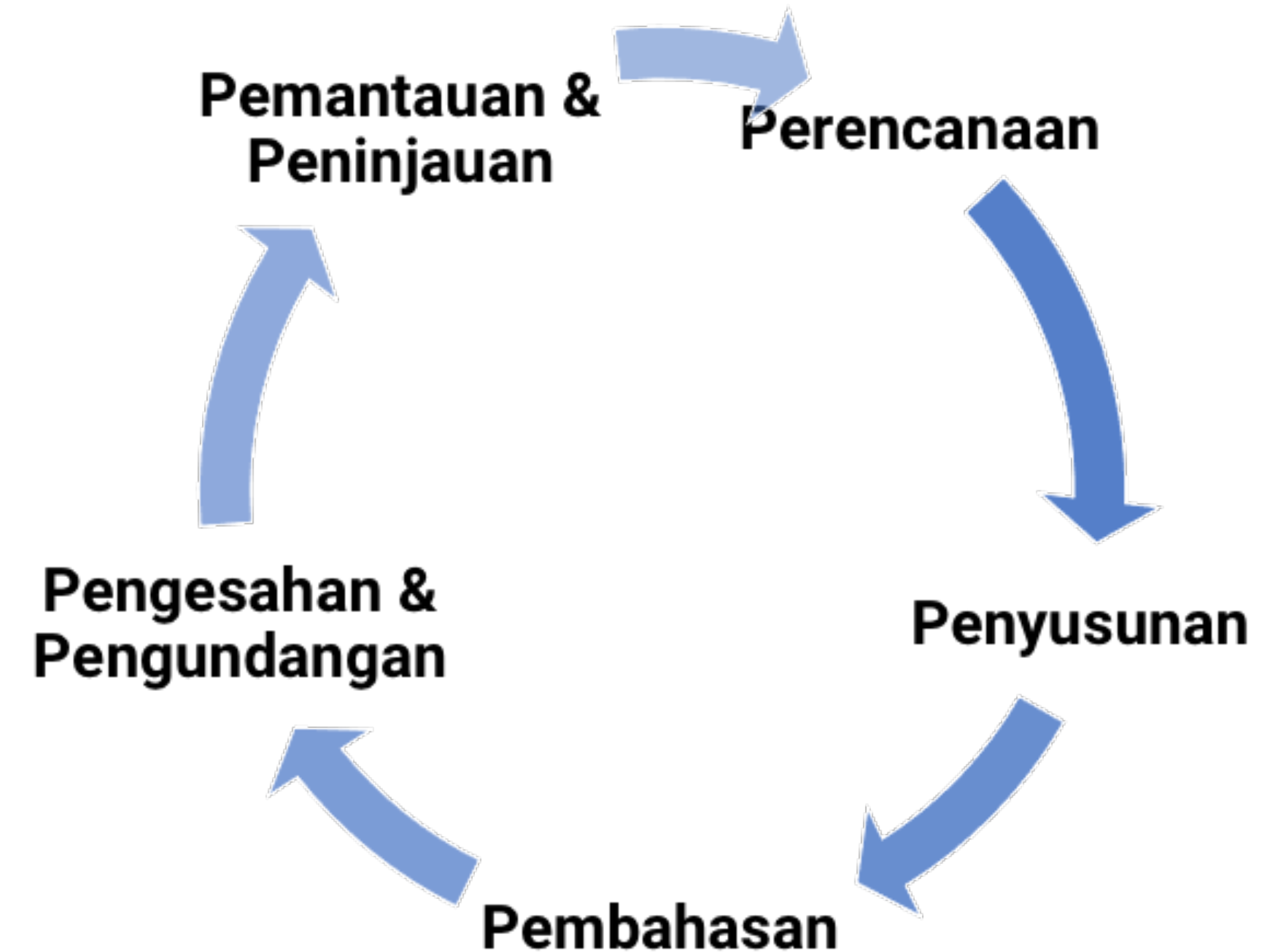
UU No. 15 Tahun 2019 (Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011)	UU No. 15 Tahun 2019 (Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011)
<p><b><i>Bab XA: Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang</i></b></p> <p><b><i>Pasal 95A</i></b></p> <p><i>(1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku.</i></p> <p><i>(2) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah.</i></p> <p><i>(3) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi.</i></p> <p><i>(4) Hasil dari Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi usul dalam penyusunan Prolegnas.</i></p>	<p><b><i>Pasal 1 angka 1</i></b></p> <p><i>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan <b>perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau</b> penetapan, pengundangan.</i></p>

# Problem Legislasi

Tidak ada mekanisme monitoring dan evaluasi yang terlembaga



*Siklus pembentukan kebijakan  
(William N. Dunn)*

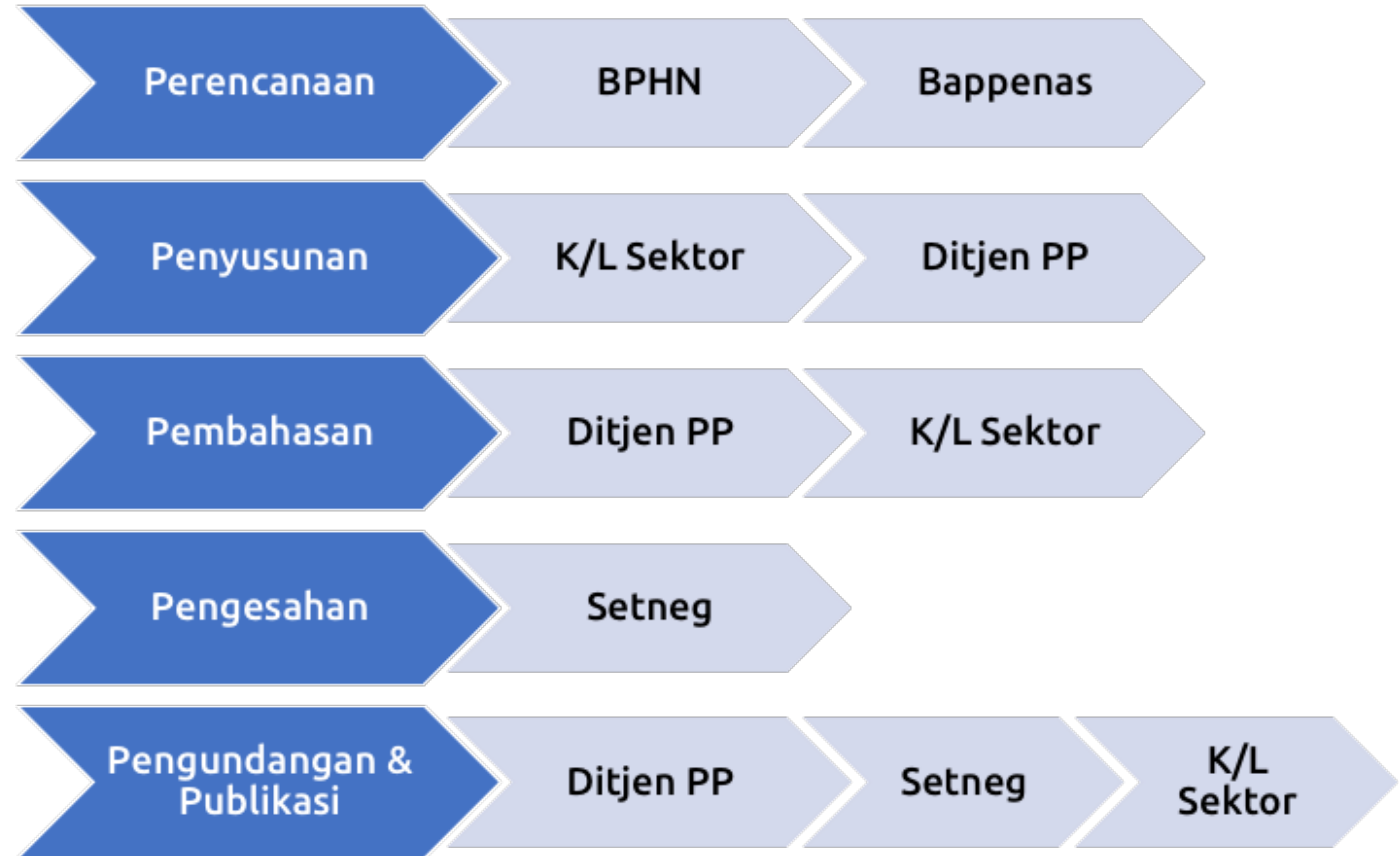


*Siklus proses legislasi yang ideal*



# Problem Legislasi

Tidak ada otoritas tunggal yang berwenang dalam pengelolaan regulasi



# Problem Legislasi

Tidak ada otoritas tunggal yang berwenang dalam pengelolaan regulasi

Home > Politik

## Ditagih, Janji Jokowi Bentuk Pusat Legislasi Nasional

Kamis, 24 Oktober 2019 | 10:02 WIB

Oleh : Fana Suparman / FMB



## Mensesneg: Pusat Legislasi Nasional Namanya Badan Regulasi Nasional

Mochamad Zhacky - detikNews

Rabu, 13 Nov 2019 14:17 WIB

1 komentar

SHARE   





PSHK  
Pusat Studi Hukum &  
Kebijakan Indonesia

# Ruang Partisipasi dalam Proses Legislasi

UU 12/2011: Asas keterbukaan (pasal 5); penyebarluasan (pasal 88); partisipasi masyarakat (pasal 96).

DPR harus memastikan sarana komunikasi dan penyerapan aspirasi yang inklusif, dapat diakses penyandang disabilitas.

DPR harus kreatif dan inovatif mengoptimalkan kanal-kanal aspirasi: Rumah Aspirasi, forum publik di luar RDPU, media sosial, nomor pribadi anggota, dsb.

DPR adalah mitra penyeimbang, bukan lembaga stempel kebijakan eksekutif. Proses *scrutiny* harus berjalan dalam pembahasan RUU.

Legislasi + Pengawasan + Anggaran = Representasi



Sumber foto: [https://rpol.id/images/berita/normal/2015/06/611203\\_07461001062015\\_KOMISI\\_VIII\\_RAPAT\\_BESAMA\\_PENYANDANG\\_DISABILITAS-4PUTU\\_WAHYU\\_RAMA.jpg](https://rpol.id/images/berita/normal/2015/06/611203_07461001062015_KOMISI_VIII_RAPAT_BESAMA_PENYANDANG_DISABILITAS-4PUTU_WAHYU_RAMA.jpg)

## Bacaan lebih lanjut:

- <https://pshk.or.id/penelitian/kajian-reformasi-regulasi-di-indonesia-pokok-permasalahan-dan-strategi-penanganannya/>
- <https://koran.tempo.co/amp/opini/459199/gerakan-hukum-setelah-cipta-kerja>
- <https://theconversation.com/selain-cipta-kerja-ada-tiga-omnibus-law-lain-yang-menunggu-disahkan-apa-layak-diteruskan-148009>
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f87d14085a4c/pelanggaran-prosedur-dapat-membuat-uu-cipta-kerja-batal-oleh--rizky-argama>
- <https://www.thejakartapost.com/news/2019/10/01/special-body-needed-harmonize-regulation.html>
- <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/can-jokowi-clean-up-indonesias-legal-mess/>
- Dunn, William N. 2018. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge.